

MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI: SOCIAL DISABILITY MODEL**Oleh: Leliy Kholida***Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari***Abstrak**

Salah satu permasalahan dalam kebijakan pemerintah untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang disemangati oleh seruan International Education for All (EFA), bahwa penuntasan EFA diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UUSPN Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Untuk menerapkan kebijakan pemerintah tersebut, Universitas Muhammadiyah Kendari, pada tahun akademik 2014/2015 terdapat tiga orang difabel daksa, salah satunya mengambil di Program Administrasi Pendidikan semester tiga. Patut diapresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Kendari yang baru berusia dua belas tahun, rasa sensitifitas difabel muncul, inilah merupakan nilai penting yang melandasi suatu perguruan tinggi inklusi adalah penerimaan. Nilai inilah merupakan salah satu dari kesatuan nilai lainnya dengan istilah ABCs. Maka manajemen pendidikan inklusi pada tahap pemula terdapat pada titik poin utama dalam pelayanan.

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan, Inklusi, Social Disability**Abstract**

One of the problems in the government's policy for compulsory 9 year basic education that is inspired by the call International Education for All (EFA), that the completion of EFA expected to be achieved by 2015. This calls in the same breath with the spirit and the spirit of Article 31 of the 1945 Constitution on the right of every citizens to acquire education and article 32 UUSPN No. 20 tahun 2003 of Special Education and Special Education Services.

To implement government policy, Muhammadiyah University Kendari, in the academic year 2014/2015, three are disabled physically disabled, one of them took in Education Administration Program of the third semester. Universitas Muhammadiyah should be appreciated to Kendari new twelve years old, disabled sensibilities appear, this is an important value underlying the inclusion of a university is the reception. This value is one of unity more value in terms of ABCs. Then the education management of inclusive education at the budding stage main points are at the point in the service

Keywords: Educational Management, Inclusi, Disability Social

Pendahuluan

Salah satu permasalahan serius dan sulit dicapai oleh bangsa ini adalah belum terwujudnya sebuah tatanan masyarakat yang demokratis dalam pengertian multikulturalis. Yaitu sebuah persekutuan di mana berbagai ruang-ruang dan wilayah, akses ekspresi dan kemungkinan pemanfaatannya terbagi secara merata di antara berbagai individu maupun kelompok sosial dan kultur, dalam segi ekonomi, aktualisasi diri dan dasar-dasar yang menjadi prinsip hak asasi manusia (Baso, 2002: xiv; Kymlicka, 1995: 144-149). Hal ini salah satu permasalahan dalam kebijakan pemerintah untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang disemangati oleh seruan International Education for all (EFA), bahwa penuntasan EFA diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UUSPN Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Triyanto Pristiwaluyo. *Peran Perguruan Tinggi dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di Daerah*. Diakses pada ABK Center).

Di Indonesia, berdasar laporan Hak Asasi Manusia kedutaan USA pada tahun 1998, menurut Departemen Sosial terdapat 6-juta orang atau sekitar 3 persen dari total penduduk Indonesia. Kaum minoritas “difabel” ini setidaknya di Indonesia berdasar laporan tersebut maka terdapat sekitar 1084 sekolah luar biasa bagi kaum cacat, 680 swasta dan 404 dikelola pemerintah, terdapat 165 dari sekolah-sekolah tersebut oleh pemerintah diintegrasikan dengan pendidikan reguler dan khusus kepada siswa (Slamet Thohari. *Menimbang Kaum Difabel dalam Kajian Ilmu Sosial*. Diakses pada senin, 21 Desember 2015).

Data 2014 menyebutkan SLB di Indonesia tercatat 1774 dan sekolah inklusi 2430. Sekolah-sekolah model itu masih hanya dijumpai di tingkat kabupaten/kota bahkan masih ada 200 kabupaten yang belum memiliki SLB. Direktorat pendidikan dasar melalui direktur pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) telah berupaya meningkatkan akses pendidikan anak-anak difabel. Misalnya mendirikan 20 pusat pendidikan autisme di seluruh Indonesia, memberikan bantuan dana bagi yayasan atau sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan mendorong lebih banyak daerah peduli pendidikan inklusi (Poskotanews. *Baru Separuh Anak difabel terlayani Pendidikan*. Post: 22 September 2014-19:57 wib).

Dari ketersediaan minimal untuk pusat pendidikan atau sekolah inklusi, namun data difabel yang real tersembunyi oleh keluarganya yang merasa sebagai “aib”, faktanya tidak sedikit pula para difabel mempunyai potensi yang lebih besar daripada orang normal di sekitarnya yaitu Kyai Abdurrahman Wachid (Gusdur) beliau sebagai presiden RI, Sugeng Siswoyudono, Cristian Sitompul, Ankie Yudistia, Hadry Satriago, Ratna Inrawasi Ibrahim, Ade Irawan, Noni, Heni Candra Hidayah, Gola gong, Stephanie Handojo, M. Sabar, dan difabel lainnya yang masih belum terasah di mana kemampuan bakat luar biasanya tersebut,

di sinilah peran anggota masyarakat yang mengetahui tetangga, teman bahkan saudara kita untuk bisa mengikuti sekolah inklusi.

Universitas Muhammadiyah Kendari, pada tahun akademik 2014/2015 terdapat tiga orang difabel daksa, salah satunya mengambil di Program Administrasi Pendidikan semester tiga. Sesosok itu semangat yang luar biasa daripada teman-teman yang normal, bangunan kampus yang didominasi dengan anak-tangga berlantai empat, setiap ada pembelajaran berlangsung, dia tidak pernah terlambat, dengan tongkatnya yang panjang tak pernah mengeluh di saat adanya perpindahan ruangan yang awalnya di lantai dasar berubah di lantai empat. di saat pembelajaran pun, dia tidak dibedakan kurikulum. Mungkin karena bisa jadi tenaga pengajar tersebut belum mengetahui, atau memang masih dianggap sama. Pada saat itu, pembelajaran matakuliah Fiqh Ibadah, praktek Sholat.

Dari uraian di atas, maka dalam tulisan ini tertarik untuk mengungkapkan apa makna pendidikan inklusif, bagaimana manajemen perguruan tinggi yang *social disability model*, serta implikasi pendidikan inklusif di perguruan tinggi, sehingga dari makalah ini, Universitas Muhammadiyah Kendari diharapkan dapat menerapkan *social disability model*.

Makna Pendidikan Inklusif

Diakui atau tidak masyarakat telah membentuk sistem dan struktur sosial nya sendiri, sementara di sisi lain, sistem sosial itu secara diametris juga mempengaruhi pola pikir dan tindakan individu tersebut secara dialektis (Peter L. Berger & Thomas Luckman, 1990: xxi).

Untuk memberikan kesempatan pada kelompok difabel agar menjadi setara dengan kelompok dalam mengakses dan mendapatkan hak dalam mengenyam pendidikan sebagai kebutuhan dasar, maka diperlukan sebuah ideologi, teori sosial yang dapat dijadikan paradigma dalam memecahkan dan menguraikan ketimpangan dan disparitas yang cukup lebar yang selama ini mengeksklusi mereka dari kelompok mainstream. Tiga paradigmatik itu adalah sebagai berikut: (a) paradigma konservatif, (b) paradigma liberal, (c) paradigma kritis (Mansoer Fakhri, 2011: 324).

Bagi mereka yang berpandangan konservatif, ketidak samaan dan ketidak sederajatan masyarakat termasuk mereka yang merasa normal dan kelompok difabel adalah sesuatu yang sifatnya alamiah yang sulit untuk dihindari bahkan merupakan takdir Tuhan yang sudah *given*. Bagi kelompok yang menggunakan paradigma liberal dalam memandang difabel mereka mengakui bahwa memang ada masalah yang terjadi di masyarakat, namun mereka menganggap pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik, ekonomi masyarakat, pendidikan hanya berperan untuk menstabilkan norma dan nilai yang hidup di masyarakat dan lebih berpihak pada status quo, pendidikan justru hanya sebatas mereproduksimobilitas sosial agar masyarakat stabil dan berfungsi dengan baik.

Bagi kelompok paradigma kritis, masalah pendidikan bagi kelompok difabel dikaji dengan refleksi kritis terhadap bias model developmentalisme yang tidak peka dan diskriminatif terhadap kelompok difabel, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang sensitif. Dalam konteks inilah menanamkan sensitifitas difabel merupakan hal utama dan menjadi dharuri dalam sosial masyarakat.

Secara umum dunia pendidikan kita mengenal dua sistem persekolahan; pertama, sekolah umum, yaitu sekolah di mana peserta didik adalah dari kelompok normal yang tidak memiliki gangguan fisik dan mental. Kedua, sekolah khusus yang sering kita kenal dengan sebutan sekolah luar biasa (SLB), ini adalah tempat belajar bagi mereka yang tergolong orang yang memiliki kemampuan yang berbeda, baik kemampuan fisik maupun mental. Adanya dua sistem sekolah tersebut adalah sebagai wujud nyata adanya kristalisasi bentuk diskriminasi terhadap kelompok difabel karena telah mengeksklusi mereka. Pemisahan seperti ini adalah sebuah batu sandungan dan dinding pemisah bagi murid normal dengan difabel untuk salibng belajar, memahami, menghargai, berperilaku menghargai dan menghormati orang lain yang mempunyai kemampuan berbeda secara langsung ketika berada di sekolah (M. Ainul Yaqin, 2005: 246).

Inklusi memberikan perhatian pada pengaturan para siswa kebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan pada sekolah-sekolah umum atau reguler sebagai ganti kelas khusus (*part time*), pendidikan khusus (*full time*) atau sekolah luar biasa (*segregasi*). Meskipun demikian, inklusi bukanlah sekedar memasukkan siswa kebutuhan khusus sebanyak mungkin dalam lingkungan belajar siswa normal.

Inklusi dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menjawab dan merespon keragaman di antara semua individu melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat dan mengurangi eksklusi baik dalam maupun dari kegiatan pendidikan. Inklusi melibatkan perubahan dan modifikasi isi, pendekatan, struktur dan strategi dalam sistem reguler dengan suatu visi bersama bahwa inklusi adalah tanggung jawab mendidik semua anak yang berada pada rentangan usia yang sama (UNESCO, 1994). Inklusi merupakan suatu sistem yang hanya dapat diterapkan ketika semua warga sekolah memahami dan mengadopsinya.

Pendidikan inklusif berkenaan dengan memberikan respon yang sesuai kepada spektrum yang luas dari kebutuhan belajar baik dalam setting pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon keragaman siswa. Pendidikan inklusif bertujuan dapat memungkinkan guru dan siswa untuk merasa nyaman dengan keragaman dan melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dari pada suatu problem.

Manajemen Pendidikan Inklusif pada Perguruan Tinggi

Secara konseptual dari sudut manajemen pendidikan inklusif sebagai salah satu implikasi adanya pergeseran layanan difabel dari *medical model* menuju *social disability model* (Rayner Steve, 2007: 55). Kedua pandangan tersebut menunjukkan keterkaitan sebuah “inti” dari pendidikan inklusif yaitu untuk memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua orang tanpa diskriminasi dan membedakan kondisi individu. Di sisi lain penerapan prinsip hakekat pendidikan dari perspektif filosofis tentang layanan pendidikan untuk membantu individu mengembangkan potensi untuk beradaptasi hidup di lingkungannya.

Pearpoint and Forest (1992) menjelaskan nilai penting yang melandasi suatu sekolah inklusif adalah penerimaan, pemilikan, dan komunitas atau *the ABCs (Acceptance, Belonging, and Community)*. Sekolah inklusif menilai interdependence sama pentingnya dengan independence. Sekolah inklusif memandang setiap anak adalah *gifted*. Sekolah inklusif menghargai semua jenis keragaman sebagai suatu kesempatan untuk belajar tentang apa yang membuat kita sebagai manusia. Inklusif memfokuskan pada bagaimana mendukung keterbakatan dan kebutuhan tertentu dari setiap anak di dalam komunitas sekolah untuk merasa tersambut dan aman serta menjadi sukses (Pearpoint, & M. Forest. “Foreward” in *curriculum considerations in inclusive Classrooms: Facilitating Learning for All Students*. pp. Xv-xviii).

Dari sudut pandang layanan difabel pendidikan inklusif juga mengandung makna memberikan kemudahan layanan. Stainback (Sunardi, 1995: 15) menjelaskan bahwa sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung semua murid dalam sekolah yang sama, dengan program pendidikan yang menantang, layak tetapi sesuai kebutuhan individu, sekolah tersebut menjadi tempat setiap anak untuk diterima sebagai bagian anggota masyarakat agar anak mencapai keberhasilannya dan terpenuhi kebutuhannya serta mampu membangkitkan kesadarannya yang kritis (*awarenees rising*). Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem yang memungkinkan difabel mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Sikap guru sangat dipengaruhi oleh sifat dan beratnya kondisi ketidak mampuan yang dimiliki para siswa. Inklusifitas juga merupakan sistem layanan pendidikan yang menyatu tanpa batas sebagai bentuk layanan pendidikan yang ideal. Prinsip layanan dalam pendidikan inklusif mencakup (1) sekolah dengan tetap berlabel *difabel*, layanan diberikan oleh guru kelas dan guru khusus bekerja secara *team teaching*; (2) sekolah tanpa berlabel difabel, layanan diberikan oleh guru kelas atau mata pelajaran dibekali kompetensi bidang “kedifabelan” dan bekerja secara tim; (3) pembelajaran di kelas dilakukan secara individual, meskipun ada beberapa anak mempunyai kebutuhan belajar yang sama; dan (4) pembelajaran berbasis multimodalitas dengan kurikulum multilevel. Di mana kurikulum harus essensial, relevan dan berguna bagi difabel, baik secara sosial, akademik dan penanaman skill mereka

merupakan sekala prioritas dan benar-benar penting untuk direalisasikan (Julie Allan (ed), 2003: 73).

Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan atau prinsip dasar pendidikan inklusif (M. Agus Nuryatno, 2007: 76-79) di antaranya:

Pertama, setiap orang secara inheren mempunyai hak terhadap pendidikan atas dasar kesamaan kesempatan. Ini adalah prinsip universal yang menjadi pijakan bagi bagi bangsa-bangsa di dunia.

Kedua, tidak boleh ada peserta didik yang terekslusi dan terdiskriminasi dalam pendidikan dengan alasan apapun, baik ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, politik, difabilitas ataupun lainnya.

Ketiga, sekolah merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan peserta didiknya, bukan sebaliknya.

Keempat, dasar pendidikan inklusif bukanlah asimilasi, akan tetapi apresiasi terhadap perbedaan.

Implikasi pada Pengelolaan Perguruan Tinggi

Bertitik pada beberapa prinsip yang diuraikan di atas, maka rumusan sejumlah implikasi pengelolaan perguruan tinggi inklusi sebagai berikut:

1. Peserta didik

Pendidikan inklusif harus dapat mengakomodasi semua anak untuk dapat mengakses pendidikan di perguruan tinggi tanpa memandang kondisi dan keterbatasan yang dimilikinya, baik berkenaan dengan kelainan (kekhususan), jenis kelamin, asal daerah, dan sebagainya.

2. Kurikulum atau program pendidikan

Model kurikulum pendidikan inklusi terdiri dari:

a. Model kurikulum reguler

Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan pesertadidik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama dengan kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama.

b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi

Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI.

c. Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI)

Individualized Educational Program (IEP) merupakan pendekatan yang memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi. Selain program akademik, maka untuk mencapai tujuan institusioanal yang komprehensif sangatlah dibutuhkan layanan bimbingan dan

konseling yang memadai sehingga menjadikan peserta didik dapat mencapai kematangan personal, sosial dan karir.

3. Pendidik dan Tenaga kependidikan

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar diperlukan dosen pembina mata kuliah, dan dosen pendidikan khusus (pendamping dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal).

4. Sarana-Prasarana

Sarana prasarana yang memiliki produktivitas yang tinggi adalah yang mampu memfasilitasiterjadinya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang bersahabat dan menyenangkan, di samping itu dapat diakses (*acesable*) oleh peserta didik dalam kondisi apapun.

5. Evaluasi

Evaluasi dalam pendidikan inklusi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti terutama mampu mendorong (*encourage*) peserta untuk maju.

6. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya memiliki kedudukan yang strategis dalam mengantar institusi dan personil pendidikan dalam mencapai kinerja yang memenuhi standar pelayanan minimal. Dalam konteks penerapan pendidikan inklusif perlu terus dilakukan secara kontinyu yang lebih diorientasikan kepada pengawasan kinerja dari pada pengawasan administratif.

7. Partisipasi masyarakat

Untuk menjamin keberlangsungan implementasi pendidikan inklusif, sangatlah diperlukan partisipasi masyarakat dari berbagai pihak terutama orang tua, organisasi profesi, dan para ahli, sehingga beban penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijangkau dengan mudah.

Peran Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara sekolah/ Perguruan Tinggi, masyarakat dan pemerintah.

Di Yogyakarta, misalnya dapat dikatakan satu-satunya perguruan tinggi yang menyatakan dirinya sebagai perguruan tinggi inklusi, yang menyediakan fasilitas bagi mahasiswa difabel hanyalah UIN Sunan Kalijaga (Safrina Rovasita, *Saatnya Perguruan Tinggi Inklusi*. Yogyakarta: Koran Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 1 Juni 2013).

Universitas Muhammadiyah Kendari

Dari pembahasan di atas, memang universitas Muhammadiyah Kendari dari segi manajemen pendidikan inklusi belumlah dapat dikatakan demikian, sebab lokasi kampusnya yang hanya kurang dari dua hektar ini merupakan komplek dari kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Taman Bustanul Athfal Aisyiyah, serta SMA Muhammadiyah.

1. Praktek manajemen pendidikan Inklusi yang ada selama ini

Sebagaimana telah dipaparkan pada pendahuluan, Universitas Muhammadiyah Kendari, pada tahun Akademik 2014/2015 terdapat tiga orang difabel daksa, ternyata setelah dilakukan verifikasi sederhana terhadap beberapa orang meliputi staff, hingga ke para pejabatnya yaitu wakil ketua dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan ternyata mahasiswa tersebut yang bertahan hanya satu orang bernama La Ode Fitra, mahasiswa Administrasi Pendidikan.

Manajemen pendidikan inklusi yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari ini tidak berbeda dengan manajemen pendidikan perguruan tinggi biasanya, belum adanya keseriusan dalam jangka waktu terdekat untuk menjadikan dan menerapkan sosial disability model.

Meskipun belum adanya ketegasan dalam manajemen pendidikan inklusinya, patut diapresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Kendari yang baru berusia dua belas tahun, rasa sensitifitas difabel muncul, inilah merupakan nilai penting yang melandasi suatu perguruan tinggi inklusi adalah penerimaan. Nilai inilah merupakan salah satu dari kesatuan nilai lainnya dengan istilah ABCs.

2. Kritik dan Solusi

Bangunan kampusnya yang memiliki empat lantai, dan belum adanya desain arsitek fasilitas kampus yang acceptable bagi difabel daksa. Harapannya, pada tahun ini, dimulainya pembangunan di area baru seluas delapan hektar ini, didesain sesuai manajemen untuk perguruan tinggi social disability model. Karena, ketersediaannya fasilitas yang acceptable ini merupakan wujud dari nilai pemilikan sehingga menjadi komunitas. Maka manajemen pendidikan inklusi pada tahap pemula terdapat pada titik poin utama dalam pelayanan.

Kesimpulan

Sensitifitas difabel merupakan hal utama yang menjadi dharuri ditanamkan dalam sosial masyarakat. Hal itulah maka lahirlah yang dinamakan pendidikan inklusi, yang mana merupakan sistem layanan difabel menyatu dalam layanan pendidikan formal. Konsep ini menunjukkan hanya ada satu sistem pembelajaran dalam perguruan tinggi yang mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar setiap individu. Secara konseptual dari sudut manajemen pendidikan inklusif sebagai salah satu implikasi adanya pergeseran layanan difabel dari *medical model* menuju *social disability model*.

Nilai penting yang melandasi suatu sekolah inklusif adalah penerimaan, pemilikan, dan komunitas atau *the ABCs (Acceptance, Belonging, and Community)*. Sekolah inklusif menilai interdependence sama pentingnya dengan independence. Sekolah inklusif memandang setiap anak adalah *gifted*. Dari inilah, maka manajemen pendidikan inklusi pada tahap pemula terdapat pada titik point utama dalam pelayanan salah satu yang paling krusial diwujudkan dalam bentuk fasilitas sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh peserta didik difabel.

Daftar Pustaka

- Asep Supana. *Model Pendidikan inklusi bagi anak Tunagrahita di Sekolah Dasar*. Jurnal pendidikan dasar vol.10 No.1 Maret 2009.
- Choirul Mahfud. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Julie Allan (ed), *Inclusion, Participation and Democracy: what is the purpose*. London: kluwer , Academic Publisher, 2003.
- Mansoer Fakhri. *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- M. Agus Nuryatno, *Madzhab Pendidikan Kritis Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- M. Ainul Yaqin. *Pendidikan Multikultural Cross Cultural Understanding untuk demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Pearpoint, & M. Forest. "Foreward" in curriculum considerations in inclusive Classrooms: Facilitating Learning for All Students (pp. Xv-xviii), edited S. Stainback & W. Stainback. Baltimore: Paul H. Brookes. 1992.
- Peter L. Berger & Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3S, 1990.
- Poskotanews. *Baru Separuh Anak difabel terlayani Pendidikan*. Post: 22 September 2014-19:57 wib.
- Rayner Steve. *Managing Special and Inclusive Education*, London: SAGE Publication, Ltd, 2007.
- Safrina Rovasita, *Saatnya Perguruan Tinggi Inklusi*. Yogyakarta: Koran Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 1 Juni 2013.
- Silverman, LK. Ed. *Counseling The Gifted & Talented*. Denver: Love Publishing Company. 1993.
- Slamet Thohari. *Menimbang Kaum Difabel dalam Kajian Ilmu Sosial*. diakses pada senin, 21 Desember 2015.

Sunardi, *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Dikti, Depdikbud, 1995.

Triyanto Pristiwaluyo. *Peran Perguruan Tinggi dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di Daerah*. Diakses pada ABK Center.

Zubaedi. *Pendidikan berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.